

Pemberdayaan Pemilih Muda Kendari Sebagai Upaya Mendukung Kesiapan dalam Memilih Pada Pemilu 2029

Civitas Consecratio
Volume 6 Nomor 1 2026: 37-53
© Penulis 2026
DOI: 10.33701/cc.v6i1.6085



Empowering Young Voters in Kendari as an Effort to Enhance Readiness for Participation in the 2029 General Election

Irmawanti¹, La Taya²

^{1,2} Universitas Halu Oleo Tegal

Penulis Korespondensi

Irmawanti
irmawanti.kf@uho.ac.id

Abstrak

Persiapan menuju Pemilu 2029 tidak hanya membutuhkan kesiapan penyelenggara, tetapi juga kapasitas warga muda untuk memahami, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi serta aspirasi politik secara bertanggung jawab. Siswa sekolah menengah merupakan kelompok strategis karena sebagian di antaranya merupakan pemilih pemula dan calon pemilih pemula yang tumbuh dalam lingkungan komunikasi digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan siswa sebagai komunikator politik muda dalam mendukung literasi pemilih di Kota Kendari. Kegiatan dilaksanakan di lima sekolah dengan tema yang disesuaikan dengan konteks masing-masing sekolah melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, pertanyaan pemantik, analisis kasus, berbagi pengalaman, kuis, dan refleksi. Evaluasi dilakukan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan tiga dimensi pemberdayaan, yaitu intrapersonal, interaksional, dan perilaku. Hasil menunjukkan indikasi penguatan kapasitas awal siswa dalam mengenali peran dan tanggung jawab sebagai komunikator politik, memahami persoalan komunikasi politik di lingkungan sekolah dan ruang digital, serta berpartisipasi dalam diskusi, menyampaikan pendapat, berargumentasi, dan melakukan refleksi. Siswa juga menunjukkan perhatian terhadap hoaks, pengaruh konten politik, penyampaian aspirasi melalui media sosial, serta etika dalam berkomunikasi. Pemberdayaan melalui edukasi, diskusi, analisis kasus, dan refleksi dapat mendukung kesiapan siswa sebagai komunikator politik muda dan calon pemilih menjelang Pemilu 2029.

Kata Kunci

Pemberdayaan Siswa, Komunikator Politik Muda, Literasi Pemilih, Komunikasi Politik, Pemilu 2029.



This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstract

Preparing for the 2029 General Election requires not only the readiness of election organizers but also the capacity of young citizens to understand, evaluate, and responsibly convey political information and aspirations. High school students constitute a strategic group, as many are either first-time voters or future first-time voters who have grown up in a digital communication environment. This community service initiative aims to empower students as young political communicators to support voter literacy in Kendari City. The program was conducted across five schools, with themes tailored to each school's specific context through material presentations, interactive discussions, guiding questions, case analyses, experience sharing, quizzes, and reflection sessions. A descriptive-qualitative evaluation was carried out based on three dimensions of empowerment: intrapersonal, interactional, and behavioral. The results indicate that students strengthened their initial capacity to recognize their roles and responsibilities as political communicators, understand political communication issues in school and digital environments, and engage in discussions, express opinions, construct arguments, and reflect. Students also demonstrated awareness of hoaxes, the influence of political content, expressing aspirations via social media, and communication ethics. Empowerment through education, discussion, case analysis, and reflection can foster student readiness as young political communicators and future voters ahead of the 2029 General Election

Keywords

Student Empowerment, Young Political Communicators, Voter Literacy, Political Communication, 2029 General Election.

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan proses demokrasi yang tidak hanya membutuhkan kesiapan kelembagaan penyelenggara, tetapi juga kesiapan warga negara sebagai pemilih. Menghadapi Pemilu 2029, persiapan demokrasi perlu dilakukan sejak dini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Kesiapan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tetapi juga partai politik, pemerintah, masyarakat sipil, serta warga negara sebagai pemilih. Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya tahapan secara administratif, tetapi juga oleh kemampuan warga dalam memahami informasi politik, menggunakan hak politik, menyampaikan aspirasi, serta mengambil keputusan secara kritis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, siswa sekolah menengah merupakan kelompok strategis dalam persiapan menuju Pemilu 2029. Sebagian siswa telah atau akan memenuhi persyaratan sebagai pemilih pemula, sedangkan sebagian lainnya berada pada tahap menuju keterlibatan sebagai pemilih. Secara normatif, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 menetapkan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin, dengan ketentuan lain yang berkaitan dengan status hak pilih dan domisili. Dengan demikian, kesiapan menjadi pemilih tidak cukup

dipahami hanya berdasarkan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis agar hak politik dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Kebutuhan tersebut semakin penting karena pemilih menghadapi berbagai persoalan dalam lingkungan politik, baik secara langsung maupun di ruang digital. Salah satunya adalah politik uang yang dapat memengaruhi kebebasan warga dalam menentukan pilihan politik. Pada Pemilu 2024, Bawaslu mencatat adanya dugaan praktik politik uang yang terjadi sejak masa tenang hingga hari pemungutan suara. Subarkah (2024) melaporkan 130 dugaan kasus politik uang, terdiri atas 121 kasus pada masa tenang dan 9 kasus pada hari pemungutan suara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemilih membutuhkan kapasitas untuk mengenali bentuk-bentuk intervensi yang dapat memengaruhi kebebasan dalam menggunakan hak pilih.

Tantangan lain muncul dari lingkungan informasi digital. Penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian dapat memengaruhi cara warga memahami persoalan politik. Biro Humas Kementerian Kominfo (2024) melaporkan bahwa ribuan konten hoaks telah ditemukan dan ditangani sepanjang tahun 2024. Dalam lingkungan media sosial, informasi politik juga diproduksi dan didistribusikan dalam bentuk yang singkat, visual, dan mudah dibagikan. Kondisi tersebut menyebabkan pemilih tidak hanya berposisi sebagai penerima informasi, tetapi juga berpotensi menjadi penyampai atau penyebar informasi

kembali kepada lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, kemampuan memahami, menilai, memverifikasi, dan menyampaikan informasi politik menjadi bagian penting dari kesiapan warga dalam menghadapi pemilu.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan pemilih tidak cukup dibangun hanya melalui penyampaian informasi ke pemilu semata. Pemilih membutuhkan kapasitas untuk mengenali persoalan, memahami lingkungan politik, mengevaluasi informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan perlu bergeser dari sekadar sosialisasi menjadi pemberdayaan. Perkins dan Zimmerman (1995) memandang pemberdayaan sebagai proses yang memungkinkan individu dan kelompok meningkatkan kapasitas untuk memperoleh kendali atas sumber daya, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan memahami lingkungannya secara kritis. Pemberdayaan dalam konteks pemilih, karena itu, tidak hanya diarahkan agar siswa mengetahui informasi ke pemilu, tetapi juga agar mereka memiliki kapasitas untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan demokratis.

Perspektif pemberdayaan menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks komunikasi politik. Perkembangan media digital memungkinkan individu untuk menerima, memproduksi, memodifikasi, dan menyebarkan pesan politik (Indryani et al., 2025). Pemilih muda dengan demikian tidak hanya menjadi audiens komunikasi politik, tetapi juga dapat berperan sebagai komunikator dalam lingkungan sosialnya (Halimi et al., 2022). Dalam perspektif Nimmo (1985), komunikator politik tidak hanya terbatas pada aktor politik formal, tetapi juga mencakup pihak yang menyampaikan pesan politik kepada khalayak. Berdasarkan perspektif tersebut, siswa dapat diposisikan sebagai komunikator politik muda ketika mereka menyampaikan pendapat, aspirasi, pengalaman, atau informasi politik kepada teman sebaya dan lingkungan sosial mereka.

Posisi tersebut penting karena sekolah merupakan salah satu ruang pembentukan pengalaman kewargaan dan politik bagi generasi muda. Interaksi di dalam kelas, organisasi siswa, pemilihan pengurus OSIS, diskusi, penyampaian kritik dan saran, serta penggunaan media sosial merupakan pengalaman yang dapat menjadi ruang pembelajaran dalam komunikasi politik (Kuwoto et al., 2024). Siswa tidak hanya perlu dipandang sebagai penerima pendidikan politik, tetapi juga sebagai subjek

yang mampu mengolah dan menyampaikan informasi serta aspirasi politik secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kapasitas awal literasi pemilih menjelang Pemilu 2029.

Kebutuhan tersebut relevan dengan jumlah pemilih muda yang besar di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Semester I 2026, terdapat 655.568 pemilih dari kelompok Generasi Milenial dan 639.939 pemilih dari Generasi Z. Dengan demikian, kedua kelompok tersebut mencakup lebih dari 1,29 juta pemilih di Sulawesi Tenggara. Besarnya kelompok pemilih muda menunjukkan bahwa persiapan menuju Pemilu 2029 tidak hanya perlu diarahkan pada peningkatan pengetahuan tentang tahapan dan prosedur pemilu, tetapi juga pada penguatan kapasitas warga muda untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi politik.

Tabel 1. Jumlah Pemilih Muda berdasarkan Kelompok Generasi

Wilayah	Tahun	Pemilih Muda	
		Gen Millenial	Gen Z
Provinsi Sultra	2024	654.484	517.628
	2025	654.615	611.931
	2026 (Semester I)	655.568	639.939
Nasional	2024	66.822.389	46.800.161
	2025	68.091.499	52.034.917
	2026 (Semester I)	68.861.127	52.645.506

Besarnya kelompok tersebut menunjukkan bahwa siswa sebagai calon pemilih perlu dipersiapkan tidak hanya untuk hadir dalam pemungutan suara, tetapi juga untuk berpartisipasi secara kritis dalam lingkungan informasi politik. Siswa dapat berada dalam posisi sebagai penerima, pengolah, sekaligus penyampai informasi kepada teman sebaya dan lingkungan sosialnya (Ariadne Shinta Dewi et al., 2025). Oleh sebab itu, kemampuan melakukan verifikasi informasi, menyampaikan pendapat, membangun argumentasi, menyampaikan aspirasi, serta mempertimbangkan aspek etika dalam komunikasi politik merupakan bagian penting dari kapasitas yang perlu dikembangkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini diarahkan pada pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dalam membangun literasi pemilih di Kota Kendari. Pemberdayaan dilakukan dengan mengintegrasikan pengetahuan tentang komunikasi politik dan pemilihan melalui diskusi, pertanyaan pemantik, analisis kasus, berbagi pengalaman, kuis, serta refleksi. Orientasi kegiatan bukan sekadar memberikan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengenali peran mereka, memahami lingkungan komunikasi politik, menyampaikan pendapat, mendiskusikan persoalan politik, serta merefleksikan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan aspirasi.

Pemberdayaan tersebut diwujudkan melalui lima fokus kegiatan. Pertama, “Aku dan Suaraku: Siswa sebagai Komunikator Politik Muda” mengarahkan siswa untuk mengenali posisi dan potensi mereka sebagai komunikator politik. Kedua, “Komunikator Politik di Era Digital: Dari Meme ke Aspirasi” mengajak siswa untuk memahami media digital sebagai ruang penyampaian gagasan dan aspirasi. Ketiga, “Melawan Hoaks, Menjadi Komunikator Politik Cerdas” mengembangkan kesadaran kritis terhadap informasi politik serta pentingnya melakukan verifikasi. Keempat, “Dari Kelas ke Demokrasi: Belajar Menjadi Komunikator Politik” menghubungkan pengalaman demokrasi di lingkungan sekolah dengan kemampuan menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan membangun aspirasi. Kelima, “Komunikator Politik Beretika: Netizen Bijak, Demokrasi Sehat” menekankan pentingnya tanggung jawab, etika, dan kesadaran akan konsekuensi komunikasi politik di ruang digital.

Kelima fokus tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak ditempatkan sebagai proses satu arah. Edukasi, diskusi, analisis kasus, tanya jawab, kuis, dan refleksi digunakan sebagai instrumen untuk membangun kapasitas siswa. Dalam perspektif Zimmerman (1995), pemberdayaan dapat dipahami melalui dimensi intrapersonal, interaksional, dan perilaku. Dimensi intrapersonal berkaitan dengan kesadaran dan keyakinan individu terhadap kapasitas dirinya; dimensi interaksional berkaitan dengan kemampuan memahami lingkungan dan sumber daya yang tersedia; sedangkan dimensi perilaku berkaitan dengan keterlibatan individu dalam tindakan atau aktivitas yang relevan. Ketiga dimensi tersebut menjadi landasan untuk melihat indikasi penguatan kapasitas

siswa sebagai komunikator politik muda dalam kegiatan pengabdian ini.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak diarahkan untuk membentuk keberpihakan politik tertentu, melainkan untuk memperkuat kapasitas siswa agar mampu memahami proses demokrasi, mengevaluasi dan memverifikasi informasi politik, menyampaikan pendapat dan aspirasi, serta berkomunikasi secara bertanggung jawab. Siswa ditempatkan bukan hanya sebagai penerima pesan politik, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengolah dan menyampaikan pesan dalam lingkungan sosialnya.

Melalui pendekatan tersebut, persiapan menuju Pemilu 2029 tidak hanya berorientasi pada kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga pada kualitas kapasitas warga muda dalam menjalankan peran komunikasi. Pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda diharapkan dapat memperkuat kesadaran, pemahaman kontekstual, dan keterlibatan mereka dalam komunikasi politik yang kritis dan etis. Dengan demikian, siswa dapat berkembang dari penerima informasi menjadi pengolah informasi dan dari pengguna media digital menjadi komunikator politik muda yang bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan peserta sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, pembelajaran, praktik, dan refleksi. Siswandi & Syaifuddin (2024) menjelaskan bahwa PAR merupakan metodologi penelitian tindakan yang dapat digunakan dalam konteks pendidikan dan sosial untuk mendorong peserta didik memahami persoalan secara kritis serta terlibat dalam proses perubahan. Dalam kegiatan ini, prinsip PAR diterapkan dengan menempatkan siswa bukan hanya sebagai penerima materi pemilihan, tetapi juga sebagai peserta aktif yang belajar mengenali perannya sebagai komunikator politik muda.

Sasaran kegiatan ini adalah siswa sekolah menengah di Kota Kendari. Dalam kegiatan ini, istilah pemilih muda dibatasi pada siswa sekolah menengah yang berada pada fase menuju keterlibatan langsung dalam proses politik elektoral. Sebagian siswa telah memenuhi atau akan memenuhi persyaratan sebagai pemilih

pemula pada Pemilu 2029, sedangkan siswa yang belum memenuhi persyaratan usia pemilih diposisikan sebagai calon pemilih yang perlu memperoleh literasi politik sejak dini.

Pembatasan tersebut penting karena siswa sekolah menengah memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok pemilih muda yang sudah berpengalaman menggunakan hak pilihnya. Siswa sasaran kegiatan berada pada kondisi belum sepenuhnya memiliki pengalaman memilih, membutuhkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, aktif berinteraksi melalui media digital, serta berpotensi menjadi penerima sekaligus penyebar informasi politik di lingkungan sebaya. Oleh karena itu, kebutuhan pengabdian tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang pemilu, tetapi juga dengan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, memverifikasi, dan menyampaikan informasi politik secara bertanggung jawab.

Berdasarkan kondisi tersebut, siswa diposisikan sebagai calon komunikator politik muda, yaitu individu yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan informasi politik kepada lingkungan sekitarnya secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Posisi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengarahkan siswa agar mendukung kandidat, partai politik, atau kepentingan politik tertentu, melainkan untuk membangun kapasitas komunikasi politik dalam kehidupan demokrasi.

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada empat tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Shahnaz Rusli et al. (2024), yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Pada tahap persiapan, tim akademisi, dosen, dan mahasiswa melakukan observasi awal di sekolah sasaran. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik peserta, kebutuhan materi, kondisi lingkungan sekolah, serta pola siswa dalam memperoleh dan menggunakan informasi politik. Observasi juga menjadi dasar dalam menentukan lokasi dan menyesuaikan materi dengan karakteristik siswa. Hasil observasi digunakan untuk menyusun tema dan subtema kegiatan yang berorientasi pada penguatan kapasitas siswa sebagai komunikator politik muda.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan di lima sekolah menengah di Kota Kendari. Tim pengabdian dibagi menjadi lima kelompok sesuai dengan lokasi dan tema kegiatan. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk menyampaikan materi, memfasilitasi diskusi, melakukan praktik atau simulasi, serta mendampingi peserta dalam proses refleksi. Pendekatan pembelajaran dibuat partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, role play, simulasi, serta praktik penyampaian pesan politik.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada 1–2 Oktober 2025, di lima sekolah menengah di Kota Kendari: SMK Negeri 04 Kendari, SMA Negeri 02 Kendari, SMA Negeri 07 Kendari, SMA Negeri 05 Kendari, dan SMA Negeri 03 Kendari. Pemilihan sekolah dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kedekatan geografis dengan Universitas Halu Oleo serta kesesuaian karakteristik peserta dengan sasaran kegiatan. Lima sekolah tersebut menjadi lokasi kegiatan karena siswa sekolah menengah merupakan kelompok strategis dalam mempersiapkan pemilih muda untuk Pemilu 2029.

Tema utama kegiatan ini adalah “Pemberdayaan Siswa sebagai Komunikator Politik Muda dalam Membangun Literasi Pemilih di Kota Kendari.” Tema utama tersebut kemudian dijabarkan menjadi lima tema kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Penentuan tema didasarkan pada tiga aspek. Pertama, aspek kepemiluan, yaitu kebutuhan siswa untuk memahami posisi, hak, dan tanggung jawabnya sebagai calon pemilih maupun pemilih pemula. Kedua, aspek komunikasi digital, yaitu perubahan pola siswa dalam memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi politik melalui media sosial. Ketiga, aspek etika dan literasi informasi, yaitu kebutuhan siswa untuk mampu mengenali informasi politik yang tidak akurat,

melakukan verifikasi, serta menyampaikan informasi dan aspirasi secara bertanggung jawab.

Konsep siswa sebagai komunikator politik mengacu pada pandangan Dan Nimmo (1985) bahwa komunikator politik tidak terbatas pada aktor politik formal, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang menyampaikan pesan politik kepada khalayak. Dalam konteks kegiatan ini, konsep tersebut diterapkan pada lingkungan siswa dan komunikasi antarsiswa. Sementara itu, penggunaan pendekatan literasi informasi politik diarahkan untuk membangun kemampuan siswa dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi politik secara kritis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lima tema kegiatan dirancang sebagai rangkaian yang saling melengkapi, mulai dari pengenalan identitas dan suara politik siswa, komunikasi politik di ruang digital, kemampuan menghadapi hoaks, praktik komunikasi demokratis, hingga etika komunikasi politik.

Tabel 2. Matrik Kegiatan

No	Tema	Batasan Materi	Metode Penyajian	Durasi (menit)
1	Laboratorium Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Kendari	Pengertian komunikator politik; posisi siswa sebagai komunikator politik muda; bentuk penyampaian pendapat dan aspirasi; komunikasi politik dalam lingkungan sebaya	Ceramah interaktif, diskusi, role play	60
2	Aula sekolah, SMA Negeri 2 Kendari	Media sosial sebagai ruang komunikasi politik; meme dan konten digital sebagai pesan; ekspresi politik; mengubah ekspresi digital menjadi aspirasi konstruktif	Ceramah interaktif, analisis contoh, diskusi kelompok, praktik	60
3	“Dari Kelas ke Demokrasi:	Hoaks dan informasi menyesatkan	Ceramah interaktif, Studi kasus,	60

	Belajar Menjadi Komunikator Politik”	n; ciri informasi yang perlu diverifikasi; sumber informasi terpercaya; langkah verifikasi sebelum membagikan informasi	diskusi, simulasi verifikasi	
4	“Dari Kelas Ke Demokrasi: Belajar Menjadi Komunikator Politik.”	Menyampaikan pendapat; mendengarkan perbedaan; diskusi; musyawarah; menyusun dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif	Ceramah interaktif, Role play, simulasi musyawarah, praktik	60
5	“Komunikator Politik Beretika: Netizen Bijak Demokrasi Sehat”	Etika bermedia sosial; kebebasan dan tanggung jawab; provokasi; ujaran kebencian; penghormatan terhadap perbedaan pilihan; jejak digital	Ceramah interaktif, studi kasus, diskusi, refleksi	60

3. Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan Siswa sebagai Komunikator Politik Muda

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menempatkan siswa sekolah menengah sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar penerima informasi. Posisi tersebut penting karena siswa berada pada fase transisi menuju partisipasi politik secara langsung. Sebagian siswa akan memasuki kategori pemilih pemula pada Pemilu 2029, sedangkan siswa yang belum memenuhi persyaratan usia merupakan calon pemilih pemula yang perlu memperoleh literasi politik sejak dini.

Pemberdayaan dalam kegiatan ini dipahami sebagai proses penguatan kapasitas individu untuk memahami lingkungan sosial-politik, memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya, serta mampu mengambil tindakan yang relevan dalam lingkungan tersebut. Konsep ini merujuk pada empowerment theory yang

menempatkan pemberdayaan bukan hanya sebagai hasil berupa pengetahuan, tetapi sebagai proses yang berkaitan dengan kemampuan individu memahami konteks, membangun kapasitas, berpartisipasi, dan memengaruhi lingkungan sosialnya (Perkins & Zimmerman, 1995)

Kerangka tersebut diterjemahkan ke dalam tiga dimensi berdasarkan Eisman et al. (2016). Pertama, intrapersonal, yaitu kesadaran dan keyakinan siswa bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, menyuarakan aspirasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Kedua, interaksional, yaitu kemampuan memahami persoalan politik, mengenali hubungan antara informasi, media, dan lingkungan sosial, serta melakukan penilaian kritis terhadap informasi politik. Ketiga, perilaku, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut melalui tindakan komunikasi, seperti menyampaikan pendapat, memverifikasi informasi, berdiskusi, dan berkomunikasi secara etis. Kerangka tiga dimensi tersebut telah digunakan dalam penelitian pemberdayaan pemuda untuk membedakan aspek keyakinan/kapabilitas, pemahaman kritis, dan tindakan.

Pemetaan Kegiatan Pemberdayaan Siswa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 1–2 Oktober 2025 di lima sekolah di Kota Kendari, yaitu SMK Negeri 4 Kendari, SMA Negeri 2 Kendari, SMAN 7 Kendari, SMAN 5 Kendari, dan SMAN 3 Kendari. Kegiatan mengangkat tema “Pemberdayaan Siswa sebagai Komunikator Politik Muda dalam Membangun Literasi Pemilih di Kota Kendari.”

Pemberdayaan dirancang dengan menempatkan siswa sebagai subjek dalam kegiatan. Siswa tidak hanya memperoleh informasi mengenai kepemiluan, tetapi juga diarahkan untuk mengenali perannya dalam komunikasi politik, memahami informasi politik, menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi, serta mempertimbangkan etika dalam menyampaikan dan menyebarluaskan pesan. Menurut Sunarso et al. (2022) pemilu merupakan sarana pendidikan politik warga negara.

Pendekatan tersebut diterapkan melalui lima tema yang disesuaikan dengan konteks masing-masing sekolah, berikut rinciannya:

Tabel 3. Pelaksanaan Pengabdian

Sekolah	Hari/Tanggal	Lokasi	Subtema
SMKN 4 Kendari	Kamis, 02 Oktober 2025	Laboratorium Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 4 Kendari	“Aku dan Suaraku; Siswa Sebagai Komunikator Politik Muda”
SMAN 2 Kendari	Kamis, 02 Oktober 2025	Aula sekolah, SMA Negeri 2 Kendari	Komunikator Politik di Era Digital: Dari Meme ke Aspirasi
SMAN 7 Kendari	Rabu, 1 Oktober 2025,	Aula SMAN 07 Kendari	Melawan Hoaks, Menjadi Komunikator Politik Cerdas
SMAN 5 Kendari	Kamis, 02 Oktober 2025	Aula di SMAN 5 Kendari	“Dari Kelas ke Demokrasi: Belajar Menjadi Komunikator Politik” Demokrasi: Belajar Menjadi Komunikator Politik.”
SMAN 3 Kendari	Kamis, 02 Oktober 2025	Aula SMAN 3 Kendari	“Komunikator Politik Beretika: Netizen Bijak Demokrasi Sehat”

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut tidak diposisikan sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai rangkaian proses pemberdayaan yang menghubungkan identifikasi kebutuhan, penguatan kapasitas, praktik komunikasi, dan refleksi peserta.

Tahap Persiapan: Identifikasi Kebutuhan dan Penentuan Dimensi Pemberdayaan

Tahap persiapan dilakukan melalui observasi awal, komunikasi dengan pihak sekolah, identifikasi karakteristik peserta, pembagian kelompok, penyusunan materi, serta penyesuaian metode sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Tahap ini penting dalam pendekatan PAR karena intervensi tidak hanya ditentukan oleh pelaksana, tetapi juga

mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran (Siswandi & Syaifuddin, 2024).

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah merupakan kelompok strategis untuk memperkuat kapasitas komunikasi politik (Pureklolon, 2020). Mereka berada dalam lingkungan sosial yang semakin terhubung dengan media digital dan berpotensi menjadi penerima sekaligus penyebar informasi politik (McCrindle & Fell, 2020). Oleh karena itu, materi tidak dibatasi pada pengenalan Pemilu 2029, tetapi diarahkan pada kemampuan yang lebih mendasar, yaitu mengenali posisi diri dalam komunikasi politik, memahami pesan politik digital, memverifikasi informasi, menyampaikan aspirasi, serta mempertimbangkan etika dalam komunikasi politik. Temuan tersebut menjadi dasar pembagian menjadi lima tema. Pembagian tema menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak dilakukan melalui satu materi yang seragam, melainkan melalui beberapa dimensi yang saling melengkapi.

1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi dari program yang telah dirancang pada tahap persiapan. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan model penyuluhan. menurut Shahnaz Rusli et al. (2024) penyuluhan merupakan model pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penyampaian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu topik atau isu tertentu. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode penyuluhan, seperti penyampaian materi dan diskusi interaktif yang disesuaikan dengan tujuan kegiatan pengabdian. Penyampaian materi dilakukan oleh tim pengabdian dengan pendekatan partisipatif agar peserta dapat memahami materi secara lebih mendalam. Selain itu, sesi diskusi dan tanya jawab juga dilakukan untuk memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, serta pandangan mereka terkait topik yang dibahas. Melalui pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran.

a. Kegiatan di SMK Negeri 4 Kendari

Kegiatan pemberdayaan di SMK Negeri 4 Kendari dengan tema “Aku dan Suaraku: Siswa sebagai Komunikator Politik Muda” ini diikuti oleh 31 siswa. Materi disampaikan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo melalui presentasi, contoh konkret, sesi tanya jawab, dan diskusi. Materi mencakup

definisi dan peran komunikator politik, praktik komunikasi politik di lingkungan sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS dan musyawarah kelas, serta tantangan komunikasi politik di media digital. Pendekatan interaktif digunakan agar siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman mereka dalam organisasi dan kehidupan sekolah.



Gambar 2. Kegiatan di SMK Negeri 4 Kendari

Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas XI TKJ aktif mengikuti kegiatan melalui pertanyaan, tanggapan terhadap contoh kasus, serta berbagi pengalaman sebagai panitia pemilihan OSIS. Temuan tersebut menunjukkan indikasi penguatan dimensi intrapersonal, yaitu kesadaran bahwa siswa memiliki ruang dan kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hal ini sejalan dengan Perkins & Zimmerman (1995) yang menempatkan keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk memengaruhi lingkungan sebagai komponen intrapersonal dalam pemberdayaan. Eisman et al. (2016) juga menunjukkan bahwa civic efficacy dan leadership efficacy merupakan bagian penting dari pemberdayaan pemuda. Dengan demikian, capaian kegiatan tidak hanya berupa pemahaman definisi komunikator politik, tetapi juga terbentuknya kesadaran siswa mengenai posisinya dalam komunikasi politik di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini juga menunjukkan indikasi penguatan dimensi interaksional, yaitu kemampuan untuk memahami lingkungan dan konteks tempat komunikasi politik berlangsung. Siswa dapat menghubungkan konsep komunikator politik dengan pemilihan OSIS, musyawarah kelas, forum diskusi, serta penyampaian kritik dan saran. Pembahasan mengenai media sosial juga memperluas pemahaman bahwa siswa tidak hanya menjadi penerima informasi politik, tetapi juga

berpotensi menjadi penyampai dan penyebar pesan. Dalam kerangka Perkins & Zimmerman (1995), dimensi interactional berkaitan dengan kemampuan memahami lingkungan sosial dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan, sedangkan Eisman et al. (2016) menempatkannya sebagai kemampuan untuk memahami konteks yang mendukung tindakan individu.

Partisipasi siswa selama diskusi memberikan indikasi awal dimensi perilaku, yang terlihat dari keberanian bertanya, memberikan tanggapan, dan berbagi pengalaman komunikasi dalam kegiatan OSIS. Namun, temuan tersebut belum dapat dimaknai sebagai perubahan perilaku politik jangka panjang karena evaluasi yang tersedia belum menggunakan pre-test–post-test maupun follow-up. Oleh karena itu, capaian kegiatan lebih tepat dipahami sebagai penguatan kapasitas awal, bukan sebagai bukti peningkatan perilaku yang permanen. Keterbatasan waktu dan variasi pemahaman awal siswa juga menunjukkan pentingnya penggunaan bahasa yang sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, serta metode interaktif dalam proses pemberdayaan.

Secara keseluruhan, kegiatan di SMK Negeri 4 Kendari menunjukkan bahwa pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dapat dibangun melalui tiga kapasitas yang saling berkaitan, yaitu kesadaran akan kemampuan diri (intrapersonal), pemahaman kritis terhadap lingkungan komunikasi (interaksional), dan partisipasi dalam tindakan komunikasi (perilaku). Temuan tersebut konsisten dengan kerangka pemberdayaan Perkins & Zimmerman (1995) dan penelitian Eisman et al. (2016) pada kelompok pemuda. Dengan demikian, kegiatan tidak diarahkan untuk menjadikan siswa sebagai aktor politik partisan, tetapi membangun kapasitas awal mereka untuk menyampaikan pendapat, memahami informasi, berdialog, dan menyuarakan aspirasi secara bertanggung jawab.

b. Kegiatan di SMA Negeri 2 Kendari

Kegiatan pemberdayaan di SMAN 2 Kendari diikuti oleh 36 siswa kelas XII dengan tema “Komunikator Politik di Era Digital: Dari Meme ke Aspirasi”. Materi ini membahas komunikasi politik digital, penggunaan meme sebagai media penyampaian aspirasi, serta peran generasi muda dalam membangun ruang digital yang sehat. Penyampaian dilakukan secara interaktif melalui presentasi visual, contoh konten digital, pertanyaan pemantik, ice breaking, dan kuis menggunakan

Wayground. Pendekatan tersebut memungkinkan siswa menghubungkan materi dengan pengalaman mereka di media sosial.



Gambar 3. Kegiatan di SMAN 2 Kendari

Hasil diskusi menunjukkan adanya indikasi penguatan dimensi intrapersonal, terutama kesadaran siswa akan perannya sebagai pengguna sekaligus komunikator di ruang digital. Peserta memandang media sosial sebagai ruang bagi anak muda untuk menyampaikan pendapat dan kritik dan memahami bahwa komunikator politik tidak hanya berasal dari politisi atau partai, tetapi juga dari masyarakat yang aktif menyampaikan pesan politik melalui media sosial. Temuan ini menunjukkan mulai terbentuknya kesadaran bahwa siswa memiliki kapasitas untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi. Hal tersebut sejalan dengan Perkins & Zimmerman (1995) yang menempatkan keyakinan terhadap kemampuan diri untuk berperan dan memengaruhi lingkungan sebagai bagian dari dimensi intrapersonal dalam pemberdayaan.

Dimensi interaksional terlihat dari kemampuan siswa untuk menghubungkan karakteristik media digital dengan proses pembentukan opini politik. Azizu menyadari bahwa meme dapat menyampaikan pesan politik secara menarik, tetapi juga berpotensi menyesatkan. Cici mampu membedakan meme yang berorientasi pada aspirasi dengan konten yang menghina, menyebarkan kebencian, atau menjatuhkan orang lain. Sementara itu, Selina menunjukkan pemahaman yang lebih kritis dengan menyadari bahwa paparan konten politik dari satu sudut pandang secara terus-menerus dapat memengaruhi cara seseorang memandang politik. Temuan ini memperlihatkan kemampuan awal siswa dalam membaca konteks, pesan, dan potensi pengaruh lingkungan digital, sesuai dengan dimensi interactional dalam kerangka psychological empowerment Perkins & Zimmerman (1995)

Dimensi perilaku tampak melalui keterlibatan siswa dalam bertanya, memberikan tanggapan, menyampaikan pengalaman penggunaan media sosial, serta mengikuti ice breaking dan kuis Wayground. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai terlibat dalam proses komunikasi dan refleksi mengenai penggunaan media sosial. Aktivitas pembuatan dan pembahasan meme aspirasi juga memberikan ruang bagi siswa untuk memahami bahwa media digital dapat digunakan untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara konstruktif. Namun, karena kegiatan ini tidak menggunakan pengukuran perilaku sebelum dan sesudah maupun evaluasi tindak lanjut, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi penguatan kapasitas awal, bukan sebagai bukti perubahan perilaku politik jangka panjang.

Kegiatan di SMAN 2 Kendari menunjukkan bahwa pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dapat diarahkan pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan ruang digital secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Ketiga dimensi pemberdayaan terlihat saling berkaitan: kesadaran siswa akan perannya sebagai komunikator (intrapersonal), kemampuan memahami pesan dan pengaruh lingkungan digital (interaksional), serta keterlibatan dalam diskusi dan aktivitas komunikasi (perilaku). Temuan ini memperkuat pandangan Perkins & Zimmerman (1995) bahwa pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kemampuan memahami lingkungan serta keterlibatan dalam tindakan. Dengan demikian, siswa tidak diarahkan menjadi aktor politik partisan, melainkan menjadi pengguna media digital yang mampu menyampaikan aspirasi, menilai informasi, dan berpartisipasi dalam komunikasi politik secara bertanggung jawab.

c. Kegiatan di SMAN 07 Kendari

Kegiatan pemberdayaan di SMAN 7 Kendari dilaksanakan pada 1 Oktober 2025 dan diikuti oleh 31 siswa kelas X1 Merdeka 7 dengan tema “Melawan Hoaks, Menjadi Komunikator Politik Cerdas”. Kegiatan berfokus pada pengenalan hoaks politik, pentingnya literasi informasi, serta tanggung jawab siswa dalam menyampaikan informasi di ruang digital. Materi disampaikan melalui pemaparan dan diskusi interaktif dengan pertanyaan pemantik, seperti alasan pentingnya mewaspadai hoaks dan contoh hoaks politik. Pendekatan tersebut mendorong siswa menghubungkan materi dengan pengalaman mereka dalam menerima informasi melalui media sosial.



Gambar 4. Kegiatan di SMAN 7 Kendari

Hasil diskusi menunjukkan adanya indikasi penguatan dimensi intrapersonal, terutama kesadaran siswa akan pentingnya bersikap kritis sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Antusiasme siswa terlihat dari pertanyaan mereka tentang cara mengenali hoaks, memverifikasi kebenaran berita, serta pengalaman mereka menemukan informasi yang meragukan di media sosial. Respons tersebut menunjukkan munculnya kesadaran bahwa siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab atas informasi yang mereka teruskan kepada orang lain. Temuan ini sejalan dengan Perkins & Zimmerman (1995) yang menempatkan kesadaran dan keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk berperan dalam lingkungan sebagai bagian dari dimensi intrapersonal dalam pemberdayaan.

Dimensi interaksional terlihat dari kemampuan siswa untuk mulai menghubungkan informasi yang diterima dengan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi. Pertanyaan siswa mengenai contoh hoaks politik dan cara memastikan kebenaran berita menunjukkan bahwa mereka mulai memahami bahwa informasi digital perlu ditempatkan dalam konteks dan diperiksa sebelum dipercaya atau disebarkan. Dalam kerangka Perkins & Zimmerman (1995), dimensi interaksional berkaitan dengan kemampuan untuk memahami lingkungan, sumber daya, serta kondisi yang memengaruhi kemampuan individu untuk bertindak. Dalam konteks kegiatan ini, kemampuan mengenali karakteristik informasi yang meragukan dan memahami pentingnya verifikasi menjadi bagian penting dari kapasitas siswa sebagai komunikator politik muda.

Dimensi perilaku tampak melalui keterlibatan aktif siswa dalam bertanya, menyampaikan pengalaman, dan berdiskusi dengan teman selama kegiatan. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya ruang bagi siswa untuk mempraktikkan komunikasi kritis melalui pertukaran

pandangan tentang hoaks dan informasi politik. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada penyampaian pengetahuan tentang hoaks, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam proses komunikasi dan refleksi. Namun, karena tidak tersedia pengukuran perilaku sebelum dan sesudah kegiatan maupun tindak lanjut, temuan ini dipahami sebagai indikasi awal penguatan kapasitas perilaku, bukan bukti perubahan perilaku dalam jangka panjang.

Kegiatan di SMAN 7 Kendari menunjukkan bahwa pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dapat diarahkan pada kemampuan mengenali informasi bermasalah, memahami pentingnya verifikasi, serta bertindak lebih bertanggung jawab dalam komunikasi digital. Ketiga dimensi pemberdayaan terlihat saling berkaitan, yaitu kesadaran untuk bersikap kritis (intrapersonal), pemahaman terhadap lingkungan dan proses verifikasi informasi (interaksional), serta keterlibatan dalam diskusi dan pertukaran pengalaman (perilaku). Temuan ini konsisten dengan kerangka psychological empowerment Perkins & Zimmerman (1995), yang memandang pemberdayaan sebagai proses yang menghubungkan kapasitas individu, pemahaman terhadap lingkungan, dan tindakan. Dengan demikian, kegiatan di SMAN 7 Kendari memperkuat posisi siswa bukan sekadar sebagai pengguna media sosial, tetapi sebagai calon komunikator politik yang bertanggung jawab untuk menyaring dan menyebarkan informasi secara cerdas dan etis.

d. Kegiatan di SMAN 5 Kendari

Kegiatan pemberdayaan di SMAN 5 Kendari dilaksanakan pada 2 Oktober 2025 dengan melibatkan anggota kelompok 4, pengurus OSIS, dan MPK. Kegiatan mengangkat tema “Dari Kelas ke Demokrasi: Belajar Menjadi Komunikator Politik” dengan materi sekolah sebagai miniatur demokrasi, pemilihan ketua OSIS sebagai praktik demokrasi, serta keterampilan komunikasi politik siswa dalam berargumentasi, berdiskusi, dan menyampaikan aspirasi.



Gambar 5. Kegiatan di SMAN 5 Kendari

Hasil diskusi menunjukkan adanya indikasi penguatan dimensi intrapersonal, terutama kesadaran siswa akan peran dan kapasitas dirinya dalam kehidupan demokratis di lingkungan sekolah. Antusiasme peserta terlihat dari perhatian selama penyampaian materi, keberanian mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, serta menyampaikan pandangan mengenai praktik demokrasi di sekolah. Pembahasan mengenai pemilihan ketua OSIS sebagai miniatur pemilu membantu menghubungkan pengalaman siswa dengan konsep demokrasi yang lebih luas. Dalam perspektif Zimmerman (1995), kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi intrapersonal, yaitu berkembangnya kesadaran dan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berpartisipasi dan memengaruhi lingkungannya.

Dimensi interaksional terlihat dari kemampuan siswa untuk menghubungkan prinsip demokrasi dengan situasi konkret di sekolah. Pertanyaan mengenai contoh demokrasi di sekolah dan sikap terhadap pemberian uang oleh calon pemimpin membuka ruang bagi siswa untuk memahami bahwa praktik demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak suara, tetapi juga dengan proses mempertimbangkan pilihan serta memahami konsekuensi dari tindakan dalam lingkungan sosial. Diskusi mengenai pemilihan ketua OSIS memberikan konteks yang dekat dengan kehidupan siswa sehingga konsep demokrasi tidak berhenti sebagai pengetahuan abstrak. Hal ini sesuai dengan kerangka Zimmerman (1995), bahwa dimensi interactional mencakup kemampuan memahami lingkungan sosial, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan individu mengambil tindakan secara tepat.

Dimensi perilaku tampak melalui keterlibatan siswa dalam diskusi, penyampaian argumentasi, pemberian tanggapan, serta penggunaan sticky notes untuk menuliskan evaluasi dan pendapat tentang materi. Aktivitas tersebut memberikan ruang bagi siswa untuk mempraktikkan komunikasi politik secara langsung, terutama dalam menyampaikan gagasan dan merespons pandangan di forum. Dengan demikian, siswa tidak hanya ditempatkan sebagai penerima materi, tetapi juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan. Namun, karena evaluasi belum menggunakan pengukuran perilaku sebelum dan sesudah kegiatan maupun tindak lanjut, temuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi awal penguatan kapasitas perilaku, bukan sebagai bukti perubahan perilaku demokratis jangka panjang.

Secara keseluruhan, kegiatan di SMAN 5 Kendari menunjukkan bahwa pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dapat dibangun melalui pengalaman demokrasi yang dekat dengan kehidupan mereka. Kesadaran terhadap peran diri (intrapersonal), pemahaman terhadap praktik demokrasi di lingkungan sekolah (interactional), dan keterlibatan dalam diskusi serta penyampaian aspirasi (perilaku) merupakan tiga kapasitas yang saling berkaitan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi ruang awal bagi siswa untuk belajar berargumentasi, mendengarkan pandangan yang berbeda, menyampaikan aspirasi, dan memahami pentingnya menggunakan hak suara secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemberdayaan diarahkan bukan untuk membentuk siswa sebagai aktor politik partisan, melainkan sebagai komunikator politik muda yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokratis secara kritis, etis, dan bertanggung jawab.

e. Kegiatan di SMAN 3 Kendari

Kegiatan pemberdayaan di SMAN 3 Kendari diikuti oleh 30 siswa dengan dukungan dari pihak sekolah. Kegiatan mengangkat tema “Komunikator Politik Beretika: Netizen Bijak, Demokrasi Sehat” dengan fokus pada cara menyampaikan pendapat politik secara santun di media sosial. Materi mencakup pentingnya memvalidasi informasi, menghindari ujaran kebencian, serta kemampuan menyampaikan argumen secara konstruktif. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi dua arah, dan kuis digital di akhir sesi.

Hasil diskusi menunjukkan adanya indikasi penguatan dimensi intrapersonal, terutama kesadaran siswa akan tanggung jawab pribadi dalam menyampaikan pendapat politik di ruang digital. Siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga berani mempertanyakan batas antara kebebasan berpendapat, ketajaman argumentasi, dan kesantunan dalam komunikasi publik. Pertanyaan siswa mengenai apakah opini harus selalu disampaikan dengan sopan menunjukkan adanya refleksi terhadap posisi dan tanggung jawabnya sebagai pengguna media sosial. Dalam kerangka Perkins & Zimmerman (1995), kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi intrapersonal karena pemberdayaan mencakup kesadaran individu akan kemampuan dan perannya dalam lingkungan sosial.

Dimensi interaksional terlihat lebih kuat melalui kemampuan siswa memahami bahwa komunikasi politik berlangsung dalam konteks sosial yang memiliki

norma, konsekuensi, dan pihak lain yang terdampak. Pertanyaan pemantik mengenai pernyataan seorang pejabat publik yang menyebut pihak tertentu sebagai “orang paling tolol sedunia” mendorong siswa membahas batas antara kritik dan komunikasi yang beretika. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa siswa mulai mempertimbangkan bukan hanya substansi suatu pendapat, tetapi juga cara pesan disampaikan dan dampaknya terhadap ruang publik. Hal ini sejalan dengan Perkins & Zimmerman (1995), yang menjelaskan dimensi interactional sebagai kemampuan memahami lingkungan sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan individu.

Dimensi perilaku tampak melalui keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kritis, menanggapi jawaban pemateri, dan terlibat dalam dialog dua arah. Salah satu pertanyaan siswa mengenai hubungan antara ketajaman argumentasi dan kesantunan menunjukkan bahwa siswa tidak sekadar menerima konsep etika secara pasif, tetapi juga mengujinya melalui argumen. Kuis digital pada akhir kegiatan juga memberikan kesempatan untuk merespons materi secara langsung serta menjadi bentuk evaluasi awal terhadap pemahaman siswa. Namun, karena belum tersedia data pre-test–post-test atau tindak lanjut, keterlibatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi awal penguatan kapasitas perilaku, bukan sebagai bukti perubahan perilaku komunikasi digital dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, kegiatan di SMAN 3 Kendari menunjukkan bahwa pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dapat diarahkan pada kemampuan menyampaikan pendapat secara kritis sekaligus mempertimbangkan etika komunikasi. Kesadaran akan tanggung jawab diri (intrapersonal), pemahaman terhadap norma dan konteks komunikasi publik (interaksional), serta keberanian untuk menguji gagasan melalui dialog (perilaku) merupakan kapasitas yang saling berkaitan. Temuan ini sejalan dengan kerangka psychological empowerment Perkins & Zimmerman (1995), yang menempatkan pemahaman lingkungan dan tindakan sebagai bagian dari proses pemberdayaan. Dengan demikian, kegiatan tidak diarahkan untuk membatasi kebebasan berpendapat siswa, tetapi membangun kemampuan mereka untuk menggunakan kebebasan tersebut secara kritis, bertanggung jawab, dan konstruktif dalam komunikasi politik digital.

Tahap Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan selesai dilaksanakan di beberapa sekolah mitra, yaitu SMK Negeri 4 Kendari, SMA Negeri 2 Kendari, SMA Negeri 7 Kendari, SMA Negeri 5 Kendari, dan SMA Negeri 3 Kendari. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi keterlibatan peserta, pemahaman terhadap materi, serta indikasi penguatan kapasitas siswa sebagai komunikator politik muda. Evaluasi menggunakan pendekatan partisipatif yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan di setiap sekolah. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mengukur perubahan perilaku politik jangka panjang, karena kegiatan ini tidak menggunakan desain pre-test–post-test maupun follow-up. Oleh karena itu, capaian kegiatan dipahami sebagai indikasi penguatan kapasitas awal yang terlihat selama proses pemberdayaan.

Evaluasi mengacu pada tiga dimensi psychological empowerment, yaitu intrapersonal, interaksional, dan perilaku (Perkins & Zimmerman, 1995). Dimensi intrapersonal digunakan untuk melihat kesadaran dan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam komunikasi politik. Dimensi interaksional digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami lingkungan komunikasi, informasi politik, norma demokrasi, serta konteks penggunaan media digital. Sementara itu, dimensi perilaku digunakan untuk melihat keterlibatan siswa dalam bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, merespons kasus, dan melakukan aktivitas komunikasi selama kegiatan berlangsung.

Evaluasi dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipasi, respons atau jawaban siswa terhadap pertanyaan pemantik dan kasus, serta evaluasi/refleksi pada akhir kegiatan. Observasi digunakan untuk mencatat keterlibatan siswa selama penyampaian materi dan diskusi. Pertanyaan pemantik digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menghubungkan materi dengan pengalaman dan situasi yang mereka hadapi di kehidupan sekolah maupun di ruang digital. Evaluasi akhir dilakukan melalui kuis, refleksi tertulis, atau tanggapan peserta sesuai dengan bentuk kegiatan di masing-masing sekolah. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dapat berbeda secara teknis, tetapi mengacu pada indikator kapasitas yang sama.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah

berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Materi yang disampaikan dinilai relevan dengan kehidupan siswa, terutama dalam konteks penggunaan media sosial dan partisipasi mereka di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, beberapa catatan perbaikan juga muncul, seperti perlunya penambahan waktu diskusi agar siswa memiliki ruang yang lebih luas untuk bertukar pandangan serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih variatif. Oleh karena itu, kegiatan serupa di masa mendatang diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas, sehingga upaya penguatan literasi komunikasi politik bagi generasi muda dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

Pembahasan

Hasil kegiatan pada lima sekolah menunjukkan bahwa pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pengetahuan politik, tetapi juga dengan pembentukan kapasitas siswa untuk memahami posisi dirinya, membaca lingkungan komunikasi, dan terlibat dalam praktik komunikasi politik. Temuan tersebut terlihat melalui tiga pola utama, yaitu munculnya kesadaran diri siswa sebagai komunikator, kemampuan menghubungkan materi dengan konteks sekolah dan media digital, serta keterlibatan siswa dalam diskusi dan penyampaian pendapat. Pola tersebut sesuai dengan konsep psychological empowerment Perkins & Zimmerman (1995) yang terdiri atas dimensi intrapersonal, interaksional, dan perilaku. Perkins & Zimmerman (1995) menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses dan hasil yang bersifat kontekstual sehingga indikatornya perlu disesuaikan dengan karakteristik kelompok dan lingkungan tempat pemberdayaan berlangsung.

Pada dimensi intrapersonal, kegiatan menunjukkan bahwa siswa mulai memandang dirinya bukan hanya sebagai penerima informasi politik, tetapi juga sebagai individu yang memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Di SMK Negeri 4 Kendari, hal tersebut terlihat dari pengalaman siswa dalam kegiatan OSIS serta keberanian mereka dalam menyampaikan pendapat (Utami et al., 2025). Di SMAN 2 Kendari, siswa mengidentifikasi media sosial sebagai ruang untuk menyampaikan gagasan dan memahami bahwa komunikator politik tidak terbatas pada politisi. Sementara itu, SMAN 7, SMAN 5, dan SMAN 3 menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi dalam menyaring informasi, berpartisipasi dalam demokrasi sekolah, dan menyampaikan pendapat secara

etis. Temuan tersebut memperkuat penelitian Eisman et al. (2016) yang secara empiris menguji model pemberdayaan pemuda berdasarkan kerangka Perkins & Zimmerman (1995) dan menemukan bahwa psychological empowerment pada pemuda bersifat multidimensional. Dengan demikian, keberanian siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat dalam kegiatan dapat dipandang sebagai bagian dari proses pembentukan civic efficacy, meskipun belum dapat disimpulkan sebagai perubahan efikasi secara kuantitatif.

Temuan tersebut juga relevan dengan penelitian Gullan et al. (2013) yang menunjukkan bahwa pengalaman program berbasis pemberdayaan di lingkungan sekolah berkaitan dengan self-efficacy dan rasa tanggung jawab kewarganegaraan. Artinya, pengalaman siswa dalam kegiatan yang memberi ruang untuk berbicara, berdiskusi, dan mengambil posisi terhadap suatu persoalan dapat menjadi bagian dari proses pembentukan kapasitas kewargaan. Namun, hasil kegiatan di Kendari masih berada pada tahap penguatan kapasitas awal, karena belum dilakukan pengukuran longitudinal untuk mengetahui apakah kesadaran tersebut bertahan dan berkembang setelah kegiatan selesai.

Pada dimensi interaksional, kelima sekolah memperlihatkan kemampuan siswa menghubungkan konsep komunikasi politik dengan lingkungan yang dekat dengan kehidupan mereka. Di SMK Negeri 4 Kendari dan SMAN 5 Kendari, konteks tersebut terutama mencakup OSIS, musyawarah kelas, pemilihan ketua OSIS, serta penyampaian aspirasi. Di SMAN 2, konteksnya bergeser ke media sosial, meme, dan pembentukan opini. Sementara itu, di SMAN 7 dan SMAN 3, siswa diarahkan untuk memahami lingkungan informasi digital melalui isu hoaks, validasi informasi, ujaran kebencian, serta etika komunikasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan menjadi lebih relevan ketika konsep politik diterjemahkan ke dalam pengalaman yang sudah dikenal oleh siswa. Temuan ini sejalan dengan Perkins & Zimmerman (1995) yang memandang dimensi interaksional sebagai kemampuan untuk memahami lingkungan, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan individu melakukan tindakan.

Sekolah juga memiliki posisi penting karena menjadi salah satu ruang untuk membentuk pengetahuan dan kompetensi kewarganegaraan. Hoskins et al. (2017) menunjukkan bahwa pengalaman belajar kewargaan di sekolah, termasuk kesempatan

untuk mengikuti aktivitas politik dan terciptanya iklim kelas yang terbuka untuk berdiskusi, berkaitan dengan proses sosialisasi politik. Hamant (2021) bahkan menunjukkan pentingnya pembelajaran demokrasi melalui pengalaman (learning by doing), bukan hanya melalui penyampaian pengetahuan tentang institusi dan proses demokrasi. Dengan demikian, penggunaan pemilihan OSIS sebagai contoh miniatur demokrasi di SMAN 5 Kendari merupakan strategi yang sesuai karena memungkinkan siswa memahami konsep demokrasi melalui pengalaman di lingkungan mereka sendiri.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian tentang sosialisasi politik remaja. Wahyuningroem et al. (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi politik di sekolah dan citizenship self-efficacy berkaitan dengan harapan partisipasi elektoral remaja. Sementara itu, Saud et al. (2020), dalam konteks Indonesia, menunjukkan bahwa sekolah merupakan salah satu agen sosialisasi kewargaan bagi kaum muda, bersama keluarga, teman sebaya, guru, dan lingkungan sosial. Temuan ini memberikan dasar bahwa kegiatan pemberdayaan di sekolah bukan sekadar kegiatan tambahan, tetapi dapat menjadi pelengkap bagi proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Dimensi perilaku menunjukkan bentuk keterlibatan siswa dalam tindakan komunikasi. Kelima sekolah menunjukkan pola yang relatif konsisten, yaitu keberanian bertanya, memberikan tanggapan, berbagi pengalaman, mengemukakan argumen, mengikuti kuis, dan menulis refleksi. Meskipun bentuknya berbeda, seluruh aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan komunikasi, bukan sekadar mendengarkan materi. Temuan ini penting karena pemberdayaan tidak berhenti pada pengetahuan saja. Perkins & Zimmerman (1995) menempatkan komponen behavioral sebagai bagian dari konstruksi pemberdayaan karena kapasitas individu perlu terhubung dengan tindakan dalam lingkungan. Eisman et al. (2016) juga menguji model pemberdayaan pemuda sebagai konstruksi multidimensional yang menghubungkan aspek intrapersonal, interactional, dan behavioral.

Dalam konteks komunikasi digital, dimensi perilaku menjadi lebih kompleks. Siswa SMAN 2 membahas penggunaan meme sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, siswa SMAN 7 membahas tindakan dalam menghadapi hoaks, sedangkan siswa SMAN 3 mendiskusikan batas antara kebebasan berpendapat, ketajaman argumentasi, dan etika

komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi komunikator politik muda di era digital tidak cukup hanya memiliki keberanian berbicara, tetapi juga membutuhkan kemampuan memilih informasi, memahami konsekuensi pesan, dan mempertimbangkan etika penyampaian. Penelitian mengenai keterlibatan politik generasi muda di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang penting bagi informasi dan komunikasi politik, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan persoalan misinformasi dan kualitas keterlibatan.

Temuan di SMAN 2 dan SMAN 7 juga menunjukkan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari pemberdayaan komunikator politik muda. Siswa tidak hanya perlu mengetahui bahwa media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga perlu memahami bahwa konten digital dapat membentuk cara pandang dan berpotensi menghasilkan pemahaman yang keliru jika tidak diverifikasi. Penelitian terbaru mengenai Gen Z di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi politik, sedangkan penelitian lain menemukan bahwa penggunaan media sosial berkaitan dengan literasi politik dan partisipasi demokratis, tetapi tantangan disinformasi tetap menjadi persoalan penting.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan dan literasi politik perlu dipahami sebagai proses yang saling melengkapi. Literasi memberikan kemampuan untuk memahami dan menilai informasi, sedangkan pemberdayaan memberikan ruang bagi siswa untuk menggunakan kemampuan tersebut dalam komunikasi dan partisipasi. Dalam konteks ini, siswa sebagai komunikator politik muda tidak dimaknai sebagai aktor politik partisan, melainkan sebagai individu yang mampu menyampaikan gagasan, menyuarakan aspirasi, berdialog, memeriksa informasi, serta mempertimbangkan etika dalam komunikasi politik. Perspektif ini sejalan dengan penelitian tentang pendidikan kewargaan yang menempatkan kompetensi politik, literasi politik, dan partisipasi sebagai unsur penting dalam pembentukan kewargaan muda.

Perbedaan tema pada lima sekolah juga menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak harus menggunakan materi yang seragam, tetapi dapat menggunakan indikator kapasitas yang sama dengan konteks pembelajaran yang berbeda. SMK Negeri 4 Kendari menekankan kesadaran siswa mengenai peran komunikator politik; SMAN 2 Kendari menekankan

komunikasi politik digital; SMAN 7 Kendari menekankan kemampuan menghadapi hoaks; SMAN 5 Kendari menekankan praktik demokrasi dan penyampaian aspirasi; sedangkan SMAN 3 Kendari menekankan etika komunikasi politik. Variasi tersebut justru menunjukkan penerapan prinsip pemberdayaan yang kontekstual, sebagaimana dijelaskan oleh Perkins & Zimmerman (1995).

Dari sisi pendekatan kegiatan, penggunaan presentasi, pertanyaan pemantik, studi kasus, diskusi, kuis, ice breaking, dan refleksi memberikan ruang bagi siswa untuk bergerak dari menerima informasi menuju mengolah dan meresponsnya. Pola tersebut mendukung pendekatan pendidikan demokrasi berbasis pengalaman. Sanusi & Sofyan (2020) menekankan bahwa pengalaman langsung dalam aktivitas kewargaan dapat memberikan ruang bagi kaum muda untuk mengembangkan kompetensi kewargaan secara lebih aktif dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya berorientasi pada pengetahuan. Dengan demikian, diskusi yang mengangkat pengalaman nyata siswa, seperti pemilihan OSIS, meme politik, hoaks, atau etika berkomentar di media sosial, menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan.

Meskipun demikian, hasil kegiatan perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan evaluasi. Data yang tersedia terutama berasal dari observasi, respons siswa, diskusi, kuis, dan refleksi selama kegiatan. Tidak terdapat pengukuran kemampuan sebelum dan sesudah kegiatan maupun pada tahap follow-up untuk mengetahui keberlanjutan perubahan. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah meningkatkan literasi politik atau mengubah perilaku politik siswa secara permanen. Posisi yang lebih tepat adalah bahwa kegiatan ini memberikan indikasi penguatan kapasitas awal pada aspek kesadaran diri, pemahaman lingkungan komunikasi, dan partisipasi. Kehati-hatian ini juga sejalan dengan Perkins & Zimmerman (1995) yang menekankan bahwa proses dan hasil pemberdayaan perlu dibedakan serta dipahami sesuai konteks, populasi, dan waktu pengukuran.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dapat dilakukan melalui pengalaman komunikasi yang dekat dengan kehidupan mereka. Pemberdayaan terjadi ketika siswa diberi pengetahuan, ruang untuk bertanya, kesempatan untuk menguji gagasan, serta pengalaman untuk menyampaikan pendapat dan merefleksikan tanggung jawab

komunikasinya. Kelima sekolah menunjukkan bentuk capaian yang berbeda sesuai konteks, tetapi memiliki pola yang sama: kesadaran diri menjadi dasar, pemahaman terhadap lingkungan komunikasi memperkuat kapasitas, dan partisipasi menjadi ruang untuk mempraktikkannya. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dasar bagi pengembangan literasi pemilih yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan memilih, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk menjadi komunikator politik yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam lingkungan sekolah maupun ruang digital luas.

4. Kesimpulan

Kegiatan pemberdayaan siswa sebagai komunikator politik muda dalam membangun literasi pemilih di Kota Kendari menunjukkan adanya indikasi penguatan kapasitas awal siswa dalam memahami dan menjalankan peran komunikasi politik melalui tiga dimensi pemberdayaan, yaitu intrapersonal, interaksional, dan perilaku. Dimensi intrapersonal terlihat dari meningkatnya kesadaran siswa terhadap posisi dan tanggung jawabnya sebagai komunikator politik; dimensi interaksional tercermin dari kemampuan menghubungkan materi dengan lingkungan sekolah, media sosial, hoaks, demokrasi, aspirasi, dan etika komunikasi; sedangkan dimensi perilaku tampak melalui keterlibatan dalam bertanya, menjawab, berdiskusi, menyampaikan pengalaman dan argumentasi, serta mengikuti kuis dan refleksi.

Lima fokus kegiatan yang disesuaikan dengan konteks masing-masing sekolah menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan secara kontekstual melalui edukasi, diskusi, analisis kasus, tanya jawab, kuis, dan refleksi untuk mendorong siswa menjadi penerima, pengolah, dan penyampai informasi politik yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemberdayaan siswa tidak hanya mendukung kesiapan mereka sebagai calon pemilih menuju Pemilu 2029, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka untuk menyampaikan aspirasi, mengevaluasi informasi, dan berkomunikasi secara etis di lingkungan sosial dan digital.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak sekolah mitra, yaitu

SMK Negeri 4 Kendari, SMA Negeri 2 Kendari, SMA Negeri 7 Kendari, SMA Negeri 5 Kendari, dan SMA Negeri 3 Kendari yang telah memberikan izin, dukungan, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi sehingga dapat berjalan dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para guru pendamping yang telah membantu mengoordinasikan kehadiran dan keterlibatan siswa selama kegiatan berlangsung. Selain itu, apresiasi diberikan kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi diskusi, berbagi pengalaman, serta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Partisipasi aktif peserta menjadi faktor penting dalam terciptanya suasana pembelajaran yang interaktif dan bermakna.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo yang telah berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan ini. Kontribusi mahasiswa dalam mempersiapkan materi, memandu diskusi, serta mengelola kegiatan di lapangan sangat membantu dalam mencapai tujuan kegiatan pengabdian ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan literasi komunikasi politik dan kesadaran generasi muda dalam menyampaikan aspirasi secara bijak di ruang publik.

5. Referensi

- Ariadne Shinta Dewi, E., Sanofi, Z., Wibowo, K. A., & Arifin, H. S. (2025). Political communication preferences of Generation Z in West Java: insights from an explanatory sequential study. *International Journal of Adolescence and Youth*, 30(1). <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2512841>
- Dan Nimmo. (1985). *The Political Persuaders: The Techniques of Modern Election Campaigns*.
- Eisman, A. B., Zimmerman, M. A., Kruger, D., Reischl, T. M., Miller, A. L., Franzen, S. P., & Morrel-Samuels, S. (2016). Psychological Empowerment Among Urban Youth: Measurement Model and Associations with Youth Outcomes. *American Journal of Community Psychology*, 58(3–4), 410–421. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12094>
- Gullan, R. L., Power, T. J., & Leff, S. S. (2013). The Role of Empowerment in a School-Based Community Service Program with Inner-City, Minority Youth. *Journal of Adolescent Research*, 28(6), 664–689. <https://doi.org/10.1177/0743558413477200>

- Halimi, M., Rahmat, R., Nugraha, R. A., & Pratiwi, E. D. (2022). Young digital citizen answers: Can online learning improve the quality of civic education learning? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 99–109. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.40140>
- Hamant, K. (2021). Edukacja obywatelska w działaniu jako klucz do wzmocnienia aktywności obywatelskiej młodych. *Przegląd Socjologiczny*, 70(3), 97–119. <https://doi.org/10.26485/ps/2021/70.3/5>
- Hoskins, B., Janmaat, J. G., & Melis, G. (2017). Tackling inequalities in political socialisation: A systematic analysis of access to and mitigation effects of learning citizenship at school. *Social Science Research*, 68, 88–101. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2017.09.001>
- Indryani, N. L. P. C., Rahmatunnisa, M., Bajari, A., & Djuyandi, Y. (2025). Digital Political Communication and Youth Political Participation in 2024 Presidential Election. *European Journal of Social Science Education and Research*, 13(2), 407–423. <https://doi.org/10.26417/96jxnp56>
- Kuwoto, M. A., Sudarmanti, R., & Utami, A. B. (2024). Construction of political education in learning Pancasila and citizenship in increasing students' political awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.73916>
- McCrindle, M., & Fell, A. (2020). *Understanding Generation Alpha*. <https://generationalalpha.com/wp-content/uploads/2020/02/Understanding-Generation-Alpha-McCrindle.pdf>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23, 569. <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Pureklolon, T. T. (2020). Komunikasi Politik: Kajian Subtansial dalam Pendekatan Politik. *Visi Komunikasi*, 19.
- Sanusi, A. R., & Sofyan, F. S. (2020). Implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karawang dalam menumbuhkan pemahaman nasionalisme generasi muda Nahdatul Ulama. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 185–194. <https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.22016>
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). The Social Media and Digitalization of Political Participation in Youths: An Indonesian Perspective. *Society*, 8(1), 83–93. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>
- Shahnaz Rusli, T., Yoseb Boari, Mp., Dahlia Amelia, Ms., drg Dewi Rahayu, M., Kes Ir Bambang Setiaji, M., Suhadarliyah, K., Syarfina, M., Ansar, Mp. C., Syahrudin, Mp., Amiruddin, Mk., & Ika Yuniwati, M. (2024). *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat* (M. Nur, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. <https://penerbitzaini.com/>
- Siswandi, & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura*, 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/uq>
- Sunarso, Suyato, Kuncorowati, P. W., Manik, T. S., & Fathurrahman, A. M. (2022). Elections as a means of citizens political education: A comparative study between Indonesia and Malaysia. *Cakrawala Pendidikan*, 41(1), 129–141. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i1.44305>
- Utami, A. A. I. D. A., Suastika, I. N., Mudana, I. W., Sriartha, I. P., Sujana, I. P. W. M., Budiarta, I. W., Sidaryanti, N. N. A., & G. Vann, M. (2025). Validity test of digital learning content in social science education for junior high schools in Singaraja city. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 535–546. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.88117>
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2023). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 543. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.1>